

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS PARONGPONG

POLICY IMPLEMENTATION OF HIV/AIDS MANAGEMENT IN PARONGPONG PUBLIC SERVICE AGENCY REGIONAL PUSKESMAS PARONGPONG

Muhamad Ali Akbari¹

Suhermanudin²

^{1,2}) Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Langlangbuana

E-mail : Aliakbar77@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah belum optimalnya Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS Di Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Parongpong Kecamatan Parongpong. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, peneliti merumuskan identifikasi masalah bagaimana Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS Di Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Parongpong Kecamatan Parongpong. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis lebih mendalam bagaimana pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS Di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Parongpong Kecamatan Parongpong dengan menganalisis masalah penelitian ini digunakan pendekatan teori Implementasi Kebijakan Menurut Edward III dalam Subarsono yang terdiri dari 4 dimensi yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan sumber data yang diperoleh melalui sumber primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis dan uji keabsahan data yang dilakukan dan diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS BLUD Puskesmas Parongpong Kecamatan Parongpong belum sesuai dengan Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS Di BLUD Puskesmas Parongpong Kecamatan Parongpong seperti, Kurangnya sosialisasi, Kurangnya tenaga ahli/Sumber Daya Manusia.

Kata Kunci: HIV/AIDS, Implementasi Kebijakan

ABSTRACT

The background to this research is that the implementation of the HIV/AIDS Management Policy at the Parongpong Community Health Center Regional Public Service Agency, Parongpong District, has not been optimal. Based on these problems, the researcher formulated an identification problem on how to implement the HIV/AIDS prevention policy at the Parongpong Community Health Center Regional Public Service Agency, Parongpong District. The purpose of this research is to find out and analyze in more depth how the HIV/AIDS Management Policy is implemented at the Regional Public Service Agency (BLUD) Parongpong Health Center, Parongpong District. By analyzing this research problem, the Policy Implementation theoretical approach according to Edward III in Subarsono is used, which consists of 4 dimensions, namely Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure. The method used in this research is a descriptive method with a qualitative approach with data sources obtained through primary and secondary sources. Data collection techniques using in-depth interviews, observation and documentation. Based on the results of the analysis and data validity tests carried out and research results obtained which show that the implementation of the HIV/AIDS Management Policy at the BLUD Parongpong Community Health Center, Parongpong District, is not in accordance with the HIV/AIDS Management Policy at the Parongpong Community Health Center BLUD, Parongpong District, such as, lack of socialization, lack of expert staff/ Human Resources.

Keywords: HIV/AIDS, Policy Implementation

1. Pendahuluan

Salah satu penyakit menular yang masih mengawatirkan di Indonesia bahkan di dunia adalah HIV/AIDS dan hingga saat ini tidak ada negara yang bebas dari HIV/AIDS. Penyebaran kasus HIV/AIDS di Indonesia ditemukan salah satunya di Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat. Meningkatnya kasus penderita HIV/AIDS di lingkungan Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat dari para kelompok remaja, dimana kelompok remaja ini

rentan terkena penyakit HIV/AIDS melalui pergaulan bebas, penggunaan narkoba dan seks bebas. Total dari 5 tahun terakhir yang terkena penyakit HIV/AIDS di Kecamatan Parongpong ada 45 jiwa, dan 90% kebanyakan yang terkena adalah laki laki, disebabkan karena faktor resiko hampir 95% LSL (Lelaki Seks Lelaki).

Penyebaran HIV/AIDS di Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat lelaki seks bebas 30 jiwa perempuan 15 jiwa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS. Dijelaskan bahwa, Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi beberapa pelayanan, yaitu:

1. Pelayanan Promotif, merupakan pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mempromosikan gaya hidup sehat serta mencegah penyakit. Pelayanan ini mencakup penyuluhan, kampanye kesehatan, vaksinasi, promosi kesehatan di sekolah atau tempat kerja, serta kegiatan-kegiatan yang mendorong orang untuk hidup sehat. Contoh pelayanan promotif, mengadakan penyuluhan tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS.
2. Pelayanan Preventif, merupakan pelayanan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit atau kondisi yang lebih serius. Tujuannya adalah mengidentifikasi faktor risiko, deteksi dini, dan tindakan pencegahan sebelum penyakit berkembang. Pelayanan ini mencakup pemeriksaan kesehatan berkala, imunisasi, skrining kesehatan, serta promosi dan edukasi tentang gaya hidup sehat. Contoh pelayanan preventif, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin.
3. Pelayanan Diagnosis, merupakan pelayanan yang bertujuan untuk menentukan penyakit atau kondisi medis yang dialami oleh individu. Pelayanan ini melibatkan

pemeriksaan fisik, anamnesis (riwayat penyakit), pemeriksaan laboratorium, pencitraan medis (seperti radiologi), dan prosedur diagnostik lainnya. Hasil diagnosis membantu dalam menentukan perawatan yang tepat

Dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS di daerah Kabupaten Bandung Barat, Bupati membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan keanggotaan terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat baik perorangan maupun lembaga KPAD mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah- langkah yang diperlukan dalam rangka

- penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
- b. Memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.
 - c. Menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS.

Upaya penanggulangan HIV/AIDS menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 2 Tahun 2017 pasal 16 antara lain:

- a. Upaya penanggulangan HIV/AIDS diselenggarakan oleh masyarakat, pemerintah daerah serta pihak yang terkait lainnya berdasarkan kemitraan.
- b. Masyarakat merupakan pelaku utama dalam penanggulangan HIV/AIDS.
- c. Pemerintah daerah harus ikut melaksanakan, mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang mendukung pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.
- d. Pihak terkait merupakan Lembaga yang mendukung upaya penanggulangan HIV/AIDS.

BLUD Puskesmas Parongpong Kecamatan Parongpong Kabupaten

Bandung Barat telah melaksanakan beberapa program penanggulangan HIV/AIDS sebagai berikut:

1. **Konseling dan Tes HIV:** BLUD Puskesmas Parongpong Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat menyediakan layanan konseling dan tes HIV secara gratis dan rahasia kepada individu yang ingin menguji status HIV mereka. Konselor akan memberikan informasi tentang HIV/AIDS, menganalisis risiko pribadi, memberikan dukungan emosional, dan membantu individu dalam membuat keputusan yang tepat terkait tes HIV.
2. **Edukasi dan Promosi Kesadaran:** BLUD Puskesmas Parongpong Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat mengadakan kampanye edukasi dan promosi kesadaran mengenai HIV/AIDS di masyarakat. Ini bisa melibatkan penyuluhan tentang faktor risiko penularan, penggunaan kondom, pentingnya pengujian rutin, dan penyebaran informasi yang akurat dan dapat dipercaya.
3. **Distribusi Kondom:** BLUD Puskesmas Parongpong Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat mendistribusikan kondom secara gratis kepada masyarakat, termasuk kepada kelompok yang berisiko tinggi terpapar HIV. Hal ini bertujuan untuk mendorong praktik seks aman dan mencegah

- penularan HIV melalui hubungan seksual.
4. Terapi Antiretroviral (ARV): BLUD Puskesmas Parongpong Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat menyediakan akses ke terapi antiretroviral bagi individu yang telah terinfeksi HIV. Terapi ini bertujuan untuk menekan perkembangan virus HIV, meningkatkan kualitas hidup, dan memperlambat perkembangan penyakit AIDS.
 5. Pemantauan dan Pemantauan Pasien: BLUD Puskesmas Parongpong Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat melakukan pemantauan dan pemantauan rutin terhadap pasien HIV/AIDS. Ini meliputi pemantauan tingkat CD4, viral load, dan kondisi kesehatan umum pasien. Puskesmas juga dapat memberikan dukungan psikososial kepada pasien untuk membantu mereka mengelola kondisi mereka dengan lebih baik.

Indikasi-indikasi lain belum optimalnya penanggulangan HIV/AIDS di Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat antara lain:

1. Kurangnya sosialisasi sehingga program penanggulangan penyakit HIV/AIDS di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Parongpong Kecamatan Parongpong tidak efektif.
2. Kurangnya tenaga ahli/Sumber Daya Manusia dalam menangani

penanggulangan penyakit HIV/AIDS di BLUD Puskesmas Parongpong Kecamatan Parongpong.

3. Komitmen aparatur untuk melaksanakan kebijakan BLUD Puskesmas Parongpong masih kurang. Terbukti penyebaran penyakit HIV/AIDS di masyarakat nyatanya masih banyak ditemukan adanya ketidaksesuaian.
4. Kurangnya kerjasama antara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Parongpong Kecamatan Parongpong dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan juga dengan Lembaga-lembaga lainnya yang ada di lingkungan masyarakat.

2. Tinjauan Pustaka

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *To Implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi.

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan.

Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik sering bertentangan dengan yang diharapkan, bahkan produk kebijakan tersebut bisa menjadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri.

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno) memberikan batasan bahwa:

“Implementasi Kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya”.

Implementasi kebijakan juga erat kaitannya dengan wujud pelaksanaan dalam mempertanyakan kebijakan yang dilaksanakan dalam mewujudkan adanya sebuah pembuatan prosedur implementasi kebijakan yang sesuai dengan alokasi sumberdaya untuk dapat dikembalikan pengimplementasiannya sesuai dengan evaluasi implementasi yang diterapkan (Nugroho, 2011). Dalam Inti permasalahan suatu implementasi kebijakan merupakan bagaimana suatu kebijakan itu dibuat dan apakah kebijakan dibuat sesuai dengan ketersediaan sumber daya. Untuk dapat mewujudkan langkah tersebut maka, diperlukan adanya implementasi kendali yang kemudian dievaluasi.

Dalam melaksanakan suatu implementasi kebijakan, ada faktor-

faktor yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan untuk mengetahui kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik atau tidak. Menurut Edward III dalam Sutarmin dalam Rahmawati (2020) yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan akan menjadi efektif apabila ditentukan oleh sumber daya, struktur organisasi komunikasi, serta disposisi atau sikap. Tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, adanya struktur organisasi dalam melaksanakan kebijakan, Komunikasi berkaitan dengan kebijakan yang dihubungkan dengan komunikasi pada organisasi atau publik, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat dan sumberdaya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, karena penelitian ini bermaksud untuk mengungkapkan kondisi pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan penyakit HIV/AIDS di Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara penelitian dengan fenomena

yang diteliti (Herdiansyah, 2012). Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif karena fenomena yang dipilih, sehingga penelitian kualitatif dirasa tepat untuk mencari, mengumpulkan, mengelola, serta menganalisis data hasil penelitian.

4. Analisis Hasil Pembahasan

Berdasarkan hasil pengamatan, permasalahan pokok terpenting berkaitan dengan implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di BLUD Puskesmas Parongpong Kecamatan Parongpong. Hasil Penelitian dan Pembahasan peneliti akan memaparkan serta menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di lingkungan Puskesmas Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat. Data yang diperoleh dengan menggunakan instrumen penelitian melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang menggunakan teknik observasi dan wawancara dengan informan yang terlibat langsung dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di BLUD Puskesmas Parongpong Kecamatan Parongpong

Peneliti akan mendeskripsikan data yang telah diperoleh dilapangan mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV Dan AIDS. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti memakai teori Faktor- Faktor Implementasi

Kebijakan Menurut Edward III dalam Subarsono yang terdiri dari:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Dari keempat dimensi tersebut peneliti melakukan wawancara dengan instansi-intasi terkait dalam implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di BLUD Puskesmas Parongpong Kecamatan Parongpong dengan Kepala puskesmas Parongpong kecamatan parongpong Kabupaten Bandung Barat dan Masyarakat yang terkena penyakit HIV/AIDS Beliau menyatakan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di BLUD Puskesmas Parongpong Kecamatan Parongpong sebagai berikut

A. Komunikasi

Di dalam dimensi Komunikasi ada 3 parameter yaitu Penyampaian isi Kebijakan mengenai Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS di BLUD Puskesmas Parongpong Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat bahwa Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS di BLUD Puskesmas Parongpong penyampaian sudah terlaksana sesuai dengan standar penanggulangan yang berlaku di BLUD Puskesmas Parongpong tersebut. Meskipun ada beberapa program yang masih belum maksimal peneliti berharap pihak

BLUD Puskesmas Parongpong mampu memaksimalkan program yang sudah ada tersebut sehingga mampu mencegah dan menanggulangi permasalahan HIV/AIDS di Kecamatan Parongpong khususnya, Kejelasan perintah dalam pelaksanaan kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS di BLUD Puskesmas Parongpong Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat bahwa Kejelasan perintah dalam pelaksanaan kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS di BLUD Puskesmas Parongpong Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat sudah terlaksana sesuai dengan kejelasan perintah dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan yang berlaku di BLUD Puskesmas Parongpong dan bahwa Konsistensi perintah dengan tujuan kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS di BLUD Puskesmas Parongpong Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat sudah terlaksana sesuai dengan melakukan sosialisai akan bahayanya penyakit HIV/AIDS di BLUD Puskesmas Parongpong.

B. Sumber Daya

Dimensi Kedua adalah Sumber daya Secara Kualitas dan Kuantitas BLUD puskesmas Parongpong telah memenuhi standar yang ada dimana untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah atau pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan Masyarakat

C. Disposisi

Dimensi ketiga adalah Disposisi BLUD kecamatan parongpong berkomitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dalam penerrapan komitmen kecamatan parongpong sudah menerapkan komitmen dalam penanggulang penyakit HIV/AIDS sesuai peraturan darah kabupaten bandung barat dan kecamatan paropong sudah memiliki tenaga ahli kuhusus dalam penanggulangan HIV/AIDS dan dalam Kegiatan Pendidikan atau Pelatihan bagi petugas pelaksana dilakukan 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali yang diadakan oleh pemerintah pusat dalah hal ini Kementrian Kesehatan tentang penanggulangan penyakit HIV/AIDS.

D. Struktur Birokrasi

Dimensi keempat Struktur Birokrasi di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Parongpong Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat dalam pembagian tugas ini telah sesuai dengan SOP sesuai dengan peraturan perundang-undangan Kesehatan.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, peneliti memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di BLUD Puskesmas

Parongpong Kecamatan Parongpong. merupakan kebijakan pemerintahan dalam rangka mewujudkan penanggulangan penyakit HIV/AIDS tercantum dalam Peraturan Pemerintahan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS.

implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di BLUD Puskesmas Parongpong Kecamatan Parongpong. (staf bidang Penanggulangan kasus HIV/AIDS di BLUD Puskesmas Parongpong Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat Penanggungan Penyakit HIV/AIDS) masih belum optimal dalam kebijakan penanggulangan penyakit HIV/AIDS menggunakan teori Implementasi Kebijakan Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi sebagai berikut:

1. Dimensi Komunikasi Peneliti mendapat kesimpulan bahwa implementasi kebijakan yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan sasaran kebijakan akan tetapi masih ada beberapa hal yang dapat diperhatikan dalam penyampaian informasi seperti sosialisasi dalam penanggulangan penyakit HIV/AIDS.
2. Dimensi Kedua adalah Sumber daya Secara Kualitas dan Kuantitas BLUD puskesmas Parongpong telah memenuhi standar yang ada dimana untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah atau pemerintah

daerah dalam memajukan kesejahteraan Masyarakat

3. Dimensi ketiga adalah Disposisi BLUD kecamatan parongpong berkomitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, dalam Kegiatan Pendidikan atau Pelatihan bagi petugas pelaksana dilakukan 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali yang diadakan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan tentang penanggulangan penyakit HIV/AIDS.

4. Dimensi keempat Struktur Birokrasi di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Parongpong Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat dalam pembagian tugas ini telah sesuai dengan SOP sesuai dengan peraturan perundang-undangan Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abidin, Said Zainal, (2012) Kebijakan Publik, Jakarta, Penerbit Salemba

Agustino, Leo. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Carl Van Horn dan Donal Van Meter, 1975, Model-model dalam Kebijakan.

Herdiansyah, H., 2009. Metode Penelitian Kualitatif: Seni dalam

memahami Fenomena Sosial.
Yogyakarta: Greentea Publishing.

Nugroho, 2011. Pelaksanaan prosedur Implementasi Kebijakan.

Teori Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92.

Teori Van Meter dan Van Horn yang di kutip pada buku yang di terbitkan oleh Agostino pada tahun 2003.

Dokumen dan Sumber Lain:

Republik, Indonesia, 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____, 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS.

Jurnal:

Syahida, Agung, Bayu. 2014. Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat.

Zainul Ihsan tahun 2019, Implementasi Permenkes No 21 Tahun 2013 Tentang Upaya Penanggulangan HIV/AIDS Oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru”.